



## EWS untuk Cegah Korupsi Pengadaan

### KPK Luncurkan Fitur e-Audit Katalog Versi 6

**JOGJA** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan fitur baru dalam aplikasi e-audit katalog versi enam di Balai Kota Jogja, kemarin (8/12). Hal itu digadang-gadang dapat meminimalisasi ruang gerak tindakan korupsi di lingkup pemerintahan ■ *Baca EWS... Hal 7*



LEBIH CEPAT DIKETAHUI: Peluncuran fitur e-audit katalog versi 6 di Balai Kota Jogja, kemarin (8/12).

## EWS untuk Cegah Korupsi Pengadaan

*Sambungan dari hal 1*

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan, fitur baru yang dikembangkan dalam versi enam itu mampu berperan sebagai peringatan dini jika ada penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sebab, sistem akan langsung mengetahui jika ada tindakan mencurigakan.

Meskipun demikian, dia menekankan, tindakan korupsi tetap bergantung terhadap bagaimana pribadi masing-masing. Jika pejabat memiliki niat melakukan penyelewengan, maka pelanggaran tetap bisa saja terjadi.

"Seberapa besar dilakukan pengawasan, bisa saja tetap terjadi korupsi. Tapi dengan adanya fitur ini akan lebih mudah, lebih cepat diketahui," ujar Agus sesuai peluncuran e-audit katalog versi enam yang merupakan rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Agus berharap, dengan adanya pengembangan fitur baru itu perangkat pemerintah bisa berpikir tiga sampai empat kali untuk melakukan tindakan korupsi. Sebab, sistem akan langsung men-

deteksi tanda-tanda anomali dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa.

Sistem e-audit katalog versi enam juga dapat langsung mengirimkan pemberitahuan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Sehingga, pengecekan pun bisa langsung dilakukan terhadap vendor maupun instansi pemberi proyek. "Karena ada pengujian-pengujian yang sifatnya otomatis," jelas Agus.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, kehadiran fitur baru e-audit katalog versi enam menjadi bentuk peringatan terhadap siapa pun yang ingin melakukan korupsi. Sekaligus mempersempit ruang gerak korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Yusuf menambahkan, sistem itu juga bisa digunakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Baik inspektorat jenderal maupun daerah. "Karena ini (kasus korupsi) pasti akan ketahuan, dan gampang sekali kami bisa cegah," katanya.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa berharap, fitur baru itu dapat

mengantisipasi penyelewengan yang mungkin selama ini terjadi. Misal jika biasanya proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu dua hari, namun tiba-tiba menjadi lebih cepat maka bisa langsung ditindaklanjuti. "Belum tentu salah memang, tapi ini *early warning system*," jelas Sarah.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan, teknologi hanya sekadar untuk membantu pencegahan. Lantaran tindakan korupsi tetap bergantung terhadap personalia pejabat.

Oleh karena itu, sebagai kepala daerah dirinya berkomitmen mempengaruhi jajarannya supaya tidak melakukan tindakan korupsi. Sebab, biasanya kasus korupsi tergantung bagaimana seorang pimpinan daerah menjalankan roda pemerintahan.

"Misalkan kami (kepala daerah) itu *nylekutis*, setiap gerak ingin dapat sesuatu. Kalau ada pimpinan yang begitu, otomatis bawahannya repot dan menerjemahkannya dengan melakukan suatu *fraud* (kecurangan)," ungkap Hasto. (\**inu/laz/zi*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005